

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana di Propinsi Jawa Barat

Dari analisis data tersebut ditemukan bahwa obyek kegiatan koordinasi antar instansi terkait dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, khususnya Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih temuan penyimpangan-penyimpangan dan belum harmonisnya hubungan antara instansi terkait tersebut terutama dalam bidang (1) dalam pengumpulan data, (2) pelaksanaan rapat (3) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, (4) pengaturan sarana dan prasarana, (5) pengaturan tentang biaya.

Adapun kegiatan yang dilakukan Tim Koordinasi dalam Penuntasan Wajar Dikdas tersebut meliputi: pendataan dan pemetaan faktor pendukung dan hambatan pelaksanaan program, penyuluhan dan publikasi, pemantauan dan evaluasi program, penyusunan organisasi, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun.

penuntasan Wajar Dikdas tersebut, yang paling dominan adalah dengan pola reguler. Pola SMP Kecil dan SMP terbuka merupakan program mengantisipasi ledakan angka transisi dari SD ke SLTP.

Pengawasan dilakukan baik melalui laporan-laporan secara tertulis setiap enam bulan, maupun dilakukan melalui rapat-rapat dinas instansi terkait yang dilakukan setiap bulan sekali. Di samping itu, Tim Koordiansi langsung turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun.

Sistem pelaporan Tim Koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai ke tingkat Propinsi. Laporan Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun tingkat Desa/Kelurahan ke tingkat Kecamatan dilakukan tiga kali setahun dan tembusannya dikirimkan ke tingkat Kabupaten. Laporan Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun tingkat Kecamatan ke tingkat Kabupaten dilakukan tiga kali setahun, dan tembusannya dikirimkan ke tingkat Propinsi. Laporan Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun tingkat Kabupaten ke tingkat Propinsi dilakukan dua kali setahun dan tembusannya dikirimkan kepada Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun tingkat Pusat. Laporan Tim Koordinasi

Wajar Dikdas 9 Tahun tingkat Propinsi kepada Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun Pusat dilakukan dua kali setahun.

3. Tanggung jawab masing-masing instansi yang terkait untuk memotivasi masyarakat agar dengan kesandaran sendiri ikut berpartisipasi dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun

Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di Tingkat propinsi didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Propinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas Tingkat Propinsi. Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun Tingkat Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 421.1/SK.432-Sosial/1994. Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 tahun Kecamatan Lembang didasarkan pada Surat keputusan Camat Kecamatan Lembang No. 421.9/SK 01-Kemasy/1992. Sedang Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 tahun di Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Padalarang, secara formal belum dibentuk. Di tingkat Desa sampai dengan penelitian ini dilakukan belum dibentuk secara formal Tim Koordinasi Wajar Dikdas. Gubernur, Bupati, Camat dan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Daerah di tingkatnya masing-masing berfungsi sebagai

penanggungjawab pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun mempunyai tanggung jawab: (1) untuk mengerahkan semua potensi yang dimiliki daerah; (2) melakukan pendataan anak usia sekolah dasar, melakukan kegiatan memantau, meminta laporan dari Tim Koordinasi di bawahnya; (3) memberikan pengarahan kepada instansi terkait baik vertikal maupun horizontal, (4) mengadakan evaluasi, dan (5) mengeluarkan Surat-surat Keputusan tentang Tim Koordinasi.

Kepala Kantor Depdikbud berusaha mengoptimalkan operasi persekolahan tingkat SLTP, penyusunan kurikulum dan penyediaan sarana/prasarana, serta biaya untuk keperluan pencapaian target Wajar Dikdas 9 tahun.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih berperan dalam menuntaskan Wajar Dikdas 6 tahun dan memberikan dorongan kepada tamatan SD untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP. Kepala Kantor Departemen Agama meningkatkan upaya madrasah dan program Paket B di pondok pesantren, serta mengendalikan kawin muda. Kepala Kantor Departemen Penerangan berusaha menyediakan kesempatan untuk penyuluhan Wajar Dikdas 9 tahun melalui forum yang ada. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja berusaha untuk menjembatani terselenggaranya Wajar Dikdas 9 tahun dengan mengendalikan

usia angkatan kerja, membantu penyelenggaraan Program Paket B bagi pekerja usia pendidikan dasar yang telanjur bekerja di perusahaan. Dan Instansi terkait lainnya masih terbatas pada pemberian laporan dalam rapat-rapat Tim koordinasi, sekaligus dimanfaatkan oleh Tim Koordinasi sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kebijaksanaan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun.

Tanggung jawab Kepala SMP Negeri dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun adalah memberikan penjelasan kepada orang tua murid tentang Wajar Dikdas, mengangkat guru honorer, memberikan keringanan atau pembebasan dari Dana Bp3 bagi anak yang tidak mampu, anak yang berasal dari daerah tertinggal, mengusahakan orang tua asuh, mencari sumber dari Badan Amal Zakat dan mendorong murid agar terus melanjutkan sekolah.

4. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Tim Koordinasi dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun

Hambatan yang menonjol adalah masalah dana, keterbatasan tenaga, sarana dan prasarana, sistem komunikasi belum berjalan dengan baik, dan sikap keterbukaan belum tumbuh dengan baik. Ada pergeseran pandangan masyarakat terhadap pendidikan sebagai andalan masyarakat untuk

memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Hambatan lain dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun disebabkan oleh sulitnya untuk memantau dan mengatasi masalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan, baik usia tenaga kerja yang masih dalam usia sekolah maupun masih banyak tenaga kerja yang sudah bekerja belum memiliki ijazah SMP/ sederajat.

Hambatan yang dialami oleh Kepala SMP dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun adalah memberikan penjelasan kepada orang tua murid tentang Wajar Dikdas, mengangkat guru honorer, memberikan keringanan atau pembebasan dari Dana Bp3 bagi anak yang tidak mampu, anak yang berasal dari daerah tertinggal.

5. Cara-cara yang ditempuh Tim Koordinasi dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ada beberapa kebijakan untuk memotivasi masyarakat dan orang tua murid untuk berperan serta menyukseskan program tersebut. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut, (1) upaya meringankan biaya sekolah meliputi, pembebasan SPP, pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu tetapi berprestasi atau berasal dari desa tertinggal, dan bantuan kepada penyelenggara pendidikan swasta, (2) pengembangan SMP Kelas

jauh dan SMP Terbuka, (3) pengoptimalisasian koordinasi antar instansi terkait, (4) meningkatkan publikasi Wajar Dikdas 9 tahun, dan (5) untuk tingkat kecamatan rayonisasi difungsikan sepenuhnya, di samping itu melakukan pembinaan masyarakat lebih intensif.

Untuk mengatasi masalah kesadaran warga belajar program Paket B baik dalam masyarakat maupun di perusahaan, dapat ditempuh melalui pembinaan terhadap peserta didik. Kepada masyarakat diberi kesadaran bahwa pendidikan itu adalah kewajiban setiap muslim, bukan semata-mata untuk meningkatkan gaji. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pembinaan mental spritual keagamaan dan pengaturan tentang ketenagakerjaan.

Anak yang belum tertampung di SLTP dapat diatasi dengan memasukan pada kursus keterampilan yang dibina oleh Penilik Diknas Kandepdikbud bekerjasama dengan Perusahaan yang ada. Setelah mereka memiliki sertifikat kursus, mereka diarahkan untuk bekerja di perusahaan sebagai penyedia dana kursus tersebut. Setelah mereka bekerja, bagi anak yang belum memiliki ijazah setingkat SLTP tersebut diberikan kesempatan untuk mengikuti program Paket B.

Penecahan masalah yang dihadapi oleh Kepala SMP dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dapat diselesaikan: (1) melalui peningkatan peranan dan fungsi Tim Koordinasi secara berkesinambungan, terpadu dan terencana, (2) dalam mengisi lowongan formasi pengangkatan guru baru perlu memperhatikan guru-guru yang mengabdikan secara sukarela, (3) pengalaman *Rereyogan*, baik *rereyogan serupi* maupun *rereyongan berseka* dan hasil *rereyogan* tersebut sebagian dimanfaatkan untuk penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, menggunakan orang tua asuh, mencari sumber-sumber lain.

6. Pola pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan Wajar Dikdas 9 tahun di masa yang akan datang

Berdasarkan temuan-temuan di atas maka untuk mempertahankan koordinasi penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun di masa yang akan datang, Tim Koordinasi perlu meningkatkan pemahaman masing-masing anggota yang terlibat tentang rencana dan tujuan yang akan dicapai, penerimaan, dan kesediaan masing-masing yang terlibat untuk menyumbangkan pendapat, pikiran dan gagasan, untuk merumuskan kebijaksanaan dan tujuan pelaksanaan.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan temuan-temuan lapangan tentang: pelaksanaan koordinasi, tanggung jawab masing-masing instansi terkait, hamabatan dan pemecahan masalah dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, maka pada akhir tulisan ini diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat seoptimal mungkin, maka dalam pelaksanaan rapat-rapat tim koordinasi perlu pengoptimalan fungsi dari tim koordinasi, terutama di tingkat kabupaten dan kecamatan serta di tingkat desa. Di samping itu juga, pengembangan fleksibilitas dan pola kurikulum wajar dalam rangka mengatasi permasalahan masing-masing daerah.
2. Untuk mengefektifkan pelaksanaan koordinasi perlu dibentuk tim koordinasi Wajar Dikdas 9 tahun di tingkat kecamatan dan desa secepat mungkin. Kemudian daripada itu, perlu ditingkatkan penyebarluasan informasi tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi terkait dari Daerah Tingkat I sampai ke desa-desa.
4. Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas dapat ditempuh melalui cara-cara antara lain:
 - a. Geografis, yaitu jarak satu desa dengan desa lain atau dengan pusat perkotaan, dan Transportasi antara desa dengan lembaga pendidikan yang ada. Oleh karena itu perlu penyempurnaan birokrasi dan penambahan sarana belajar seperti SPM terbuka, SMP kecil, Paket A dan B, di pasentran-pasantren dan di perusahaan-

perusahaan, disamping itu juga perlu dikembangkan adalah sentral-sentral pembelajaran di tempat-tempat bekerja.

- b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan tenaga guru/tutor sesuai dengan tututan kurikulum yang akan dikembangkan, masalah sekarang bukan berarti kekurangan guru saja, tetapi paling penting adalah pemanfaatna guru yang ada. Karena di daerah tertentu juga adanya kelebihan guru.
 - c. Melengkapi perangkat hukum, yaitu pengaturan tentang hak lulusan pendidikan dasar 9 tahun sebagai tenaga kerja lapangan atau pengatauran tenaga kerja yang akan bekerja yang belum memiliki ijazah SLTP.
 - d. Untuk mengatasi kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP dapat di tempuh melalui pengalangan *Rereyogan*, baik *rereyogan serupi* maupun *rereyonag berseka* dan hasil *rereyonga* tersebut sebagian di nanfaatkan untuk penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, mengusahakan orang tua asuh, mencarikan sumber dari Badan Amal Zakat dan sumber-sumber lain.
5. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun perlu ditingkatkan dan penyempurnaan pola pelaksanaan koordinasi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip pola koordinasi yang baik.

6. Untuk memantapkan koordinasi penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun di masa yang akan datang, Tim Koordinasi perlu meningkatkan pemahaman masing-masing anggota yang terlibat tentang rencana dan tujuan yang akan dicapai, penerimaan, dan kesediaan masing-masing yang terlibat untuk menyumbangkan pendapat, pikiran dan gagasan, untuk merumuskan kebijaksanaan dan tujuan pelaksanaan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan koordinasi secara baik perlu adanya (1) struktur organisasi yang layak, (2) Peta organisasi dan pernyataan tentang kewajiban serta hubungan kerja, (3) pernyataan tertulis tentang kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, (4) adanya sistem komunikasi formal yang memadai, (5) adanya komisi-komisi perwakilan dari masing-masing instansi, (6) adanya kelompok kerja yang terdiri dari masing-masing instansi yang mencari pemecahan masalah yang dihadapi, (7) pernyataan tertulis tentang rencana dan prosedur kerja, (8) garis besar rencana kegiatan, (9) buku pedoman atau panduan tentang tatalaksana kegiatan, (10) adanya laporan yang memadai kepada pimpinan, (11) adanya ikatan informal di kalangan antar anggota, dan (12) kewenangan masing-masing anggota yang telah disepakati.



IKIP